



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DWI AMPERAWATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **274044**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.580.000.000**

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
3. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/148 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **438.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **242.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	338.982.635
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.599.482.635
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.599.482.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.